

**KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Dengan Tinjauan Khusus Dalam Pembangunan Perkotaan**

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas

**Pada Seminar Nasional Urban and Regional Development Institute (URDI)
Jakarta, 23 September 1996**

Saya mengucapkan selamat atas berdirinya Urban and Regional Development Institute (URDI), atau Lembaga Komunikasi Pengembangan Perkotaan dan Daerah, yang merupakan suatu lembaga independen dengan fungsinya sebagai wadah bagi forum komunikasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membahas berbagai permasalahan dan gagasan serta alternatif tindakan pembangunan perkotaan dan pengembangan wilayah. Bagi pemerintah forum komunikasi semacam ini akan berfaedah karena dapat memberikan masukan dalam penyusunan dan pengembangan kebijaksanaan perkotaan dan daerah.

Selain itu, saya juga menyampaikan penghargaan, atas diselenggarakannya Seminar Nasional ini, yang akan membahas sebuah masalah yang penting dalam upaya pembangunan nasional, yaitu kemitraan dalam pelaksana pembangunan.

Dalam PJP II ini, kemitraan dalam pembangunan seharusnya akan makin meningkat sejalan dengan meningkatnya ke mampuan masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Semua sudah mengetahui bahwa pembangunan di Indonesia berlangsung pesat. Perkembangan yang pesat ini dapat dilihat dari tingginya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun 1995 telah mencapai 8,1 persen. Angka ini merupakan suatu peningkatan dari 7,5 persen pada tahun 1994. Sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata yang ditetapkan untuk masa PJP II adalah 7 persen per tahun, kurang lebih sama dengan tingkat pertumbuhan selama PJP I. Kalau itu dapat terjadi maka selama 50 tahun ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 7 persen setahun. Suatu prestasi yang mungkin tidak ada duanya. Dengan laju pertumbuhan setinggi itu diharapkan pendapatan riil per kapita bangsa Indonesia akan meningkat empat kali atau menjadi sekitar US\$ 3,800 menurut harga tahun 1993.

Dengan sendirinya akan dbutuhkan cukup besar dana investasi. Untuk Repelita VI saja kebutuhan pendanaan pembangunan nasional yang diperlukan berkisar sekitar 815 triliun, di mana untuk pembangunan infrastruktur diperlukan sekitar 500 triliun.

Diharapkan sekitar tiga perempat dari pembiayaan pembangunan dapat digerakkan oleh masyarakat termasuk dunia usaha. Sisanya adalah dari pemerintah yang diarahkan untuk menciptakan kesempatan berusaha yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat termasuk untuk memberdayakan lapisan masyarakat yang kurang berkemampuan.

Melihat kenyataan di atas, maka pembangunan nasional dalam PJP II perlu diletakkan dalam kerangka kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha. Agar terwujud kemitraan yang saling mendukung, maka perlu diciptakan iklim yang menggairahkan dan perangkat dan pranata yang memadai.

Kemitraan pada hakikatnya merupakan wujud yang ideal dalam peranserta masyarakat dalam pembangunan. Kemitraan didasari atas hubungan antarpelaku yang

bertumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan, serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Setiap pelaku usaha memiliki potensi, kemampuan dan keistimewaan sendiri, walaupun berbeda ukuran, jenis, sifat, dan tempat usahanya. Setiap pelaku usaha juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dengan kelebihan dan kekurangan itu timbul kebutuhan kerjasama dan kemitraan. Dengan demikian, kelebihan-kelebihan akan dilipatgandakan dengan memaksimalkan manfaat yang mungkin diperoleh. Sedangkan kekurangan-kekurangan dapat diusahakan untuk dikurangi, atau bahkan dihilangkan sama sekali, dengan kerjasama yang saling menutupinya.

Kemitraan dalam pembangunan pada dasarnya mengandung hakekat keadilan dalam perolehan keuntungan dan manfaat, pembebanan biaya dan penanggungan resiko yang timbul dalam kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian, kemitraan yang dikembangkan adalah kemitraan yang setara antara para pelaku sesuai dengan kemampuan kontribusinya. Kemitraan yang setara memerlukan pula pemahaman yang kuat terhadap hak dan tanggung jawab serta peranan dari masing-masing pelaku.

Menjadi tantangan kita bersama untuk mengembangkan semangat dan suasana yang mendorong tumbuhnya kemitraan dan mengembangkan pola-pola yang praktis dan menarik, serta menjamin keuntungan bagi semua pihak.

Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat tentu harus memiliki tanggung jawab karena kemitraan bukanlah bertepuk sebelah tangan. Meskipun semua pihak memiliki tanggung jawab, pemerintah tetap harus mengambil prakarsa paling tidak untuk menciptakan iklim yang merangsang bagi usaha kemitraan, antara lain dengan:

- a) Mengembangkan kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang jelas, yang tercermin baik pada tujuan, arahan maupun indikator-indikator kebijaksanaan (*policy indicators*).
- b) Menetapkan prioritas pembangunan yang realistis dan diikuti oleh semua pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu perlu kesepakatan di antara berbagai pelaku pembangunan ini, dan karena itu perlu ada dialog-dialog.
- c) Memantapkan mekanisme komunikasi yang lancar dan transparan. Transparansi erat kaitannya dengan tingkat partisipasi dan oleh karena itu, sejak pada tahap awal mekanisme kemitraan yang transparan harus dikembangkan dan dimantapkan.
- d) Mengembangkan pilihan-pilihan atas pola-pola kemitraan yang dapat mencakup kepentingan-kepentingan yang ada di berbagai lapisan dan golongan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperanserta seluas-luasnya dalam kemitraan pembangunan.
- e) Menyiapkan rencana pengembangan kemitraan yang mencakup rencana investasi pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan nasional.
- f) Menyiapkan kerangka peraturan dan arahan serta pedoman yang dapat menjadi acuan terutama bagi swasta dan masyarakat dan juga menjamin kepastian usaha.

Pengembangan kemitraan dalam pembangunan kota dapat mencakup dua pola dasar, yaitu pertama, dalam bentuk peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan yang sifatnya memberikan lebih banyak peluang untuk berpartisipasi pada kegiatan yang semula merupakan tugas pemerintah. Atau dengan kata lain, pemerintah memberi ijin pemanfaatan aset milik pemerintah (konsesi) kepada pihak swasta dan masyarakat untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu guna melakukan tugas-tugas pelayanan umum. Kedua, kerjasama kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah melalui pengembangan formula pembagian modal kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam rangka ini dikembangkan pola-pola kerjasama kemitraan yang mencakup pembagian keuntungan dan sekaligus juga risikonya.

Untuk mewujudkan kemitraan dalam bentuk-bentuk tersebut, perlu kesepakatan dalam persepsi kemitraan antara swasta maupun pemerintah. Swasta tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi jangka pendek saja, apalagi yang bersikap spekulatif, tetapi sudah harus memperhatikan kesinambungan pembangunan, atau lebih mengkonseptualisasikan pemikiran investasi yang berwawasan jangka panjang.

Baru-baru ini Bappenas bersama Bank Dunia telah menyelenggarakan konferensi internasional tingkat tinggi mengenai infrastruktur, yang tujuannya adalah mencari jalan yang tepat untuk mendorong kemitraan dan partisipasi swasta dalam pembangunan prasarana.

Dari hasil konperensi tersebut telah disimpulkan bahwa yang terpenting bukanlah dana, tetapi justru perlunya kebijakan dan kerangka yang jelas untuk membangun kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Adanya kerangka itu dapat mengurangi ketidakpastian yang sampai sekarang ini dirasakan, khususnya di kalangan swasta, misalnya kerangka tentang kelembagaan, kontrak, dan produksi termasuk jasa.

Secara potensial ada peluang-peluang yang terbuka lebar untuk menumbuhkembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan perkotaan. Potensi dan peluang yang besar ini terutama disebabkan oleh makin meningkatnya kemampuan masyarakat di perkotaan untuk memperoleh pelayanan perkotaan yang makin berkualitas dengan sistem penyediaan yang lebih baik. Kemampuan masyarakat perkotaan untuk membayar pelayanan yang lebih baik tersebut memberi landasan keekonomian yang kuat bagi pengembangan kemitraan dalam penyediaan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan.

Di kota-kota metropolitan dan di kota-kota besar, kegiatan yang digerakkan oleh swasta dan masyarakat mencapai sekitar 60-70 persen. Di DKI Jakarta, sekitar 80 persen kegiatan pembangunan perkotaan digerakkan oleh dunia usaha dan masyarakat. Pihak swasta telah melaksanakan kegiatan pembangunan dalam berbagai sektor, dalam skala mikro maupun makro serta secara mandiri maupun bermitra dengan pemerintah. Peran swasta itu dapat diperkirakan akan terus meningkat.

Dari sekitar 310 triliun rupiah yang diperkirakan dalam Repelita VI untuk kebutuhan pembangunan dan penyediaan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, industri, dan permukiman, sekitar 215 triliun rupiah dapat dikembangkan atas dasar kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Selama ini kemitraan telah berkembang dalam prasarana ekonomi yang kelayakannya tinggi, seperti jalan tol, listrik, telepon. Namun, khusus di kota-kota megapolitan, metropolitan, dan kota-kota besar lainnya, peluang kemitraan dalam penyediaan air bersih, prasarana dan sarana kesehatan lingkungan, persampahan, jalan kota, rumah sakit, sekolah-sekolah unggulan, dan prasarana serta sarana sosial lainnya terbuka cukup lebar.

Berdasarkan cara pandang kota sebagai pusat pelayanan ekonomi wilayah/kawasan, maka hendaknya kota tidak hanya dilihat sebagai unit yang berdiri sendiri secara individual, tetapi dipandang sebagai satu kesatuan dalam suatu sistem. Berkaitan dengan peningkatan peran swasta dalam berbagai bentuk pembangunan skala besar seperti pembangunan perumahan, kota baru, kota satelit dan lain-lain, maka kegiatannya perlu dilaksanakan dalam suatu kerangka sistem perkotaan yang lebih luas, di samping pembangunan sistem internal kotanya sendiri. Dengan demikian, dapat terwujud keterpaduan dan sinkronisasi sistem prasarana kota dan antara kota yang berdampingan atau berdekatan, baik yang dibangun pemerintah maupun yang dibangun oleh swasta. Selain itu juga dapat saling mendukung dengan sistem dalam kota intinya dan juga mendukung keterkaitan dengan kota-kota lainnya. Dengan kata lain, sinkronisasi pembangunan regional merupakan tantangan yang harus diatasi dengan meningkatnya berbagai bentuk pembangunan skala besar oleh pihak swasta.

Dalam banyak hal, memang kegiatan swasta sudah tidak lagi berskala mikro, tetapi sudah sampai pada skala makro yang berdampak makro pula, seperti pengembangan permukiman skala besar atau kota baru, penyediaan sistem telekomunikasi melalui satelit, pembangunan pusat-pusat tenaga listrik, pelabuhan, dan sebagainya. Mengingat makin besarnya bentuk dan nilai partisipasi swasta dalam pembangunan perkotaan yang berskala besar seperti itu, maka sinkronisasi investasi pembangunan menjadi imperatif agar terjadi sinergi yang optimal antara berbagai pelaku pembangunan perkotaan. Kegiatan yang saling tumpang tindih harus dapat dihilangkan. Di sisi lain, adanya sinkronisasi dapat mengisi 'gap' atau kekosongan dari suatu kegiatan pembangunan.

Demikianlah beberapa segi kemitraan khususnya dan pembangunan perkotaan yang menonjol dan kiranya cukup penting untuk dikembangkan lebih lanjut dan dibahas antara lain dalam seminar ini.

Kemitraan adalah pola yang sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya yang ingin kita dorong dalam perekonomian dan pembangunan. Kemitraan juga dapat memberi pemecahan atas dilema efisiensi dan pemerataan kesempatan, karena efisiensi tidak mengharuskan pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu. Kemitraan merupakan jawaban terhadap monopoli yang dalam sistem ekonomi pasar dan liberal menjadi penyakit yang senantiasa menjadi masalah bagi negara yang menganut paham itu. Kemitraan haruslah didorong tidak saja antara pemerintah dengan usaha besar, tetapi juga dengan usaha kecil dan koperasi, serta antara usaha swasta besar, menengah dan kecil. Dengan demikian kemitraan adalah usaha yang tepat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang mendasar, dalam membangun ekonomi yang berdasarkan demokrasi.

Sekali lagi saya ucapkan selamat semoga usaha Saudara-saudara berhasil mencapai tujuan.